

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, KINERJA
PEGAWAI, PENGAWASAN MELEKAT DAN PENGAWASAN FUNGSIONAL
TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(Studi pada SKPD Kabupaten Lima Puluh
Kota Payakumbuh Sumatera Barat)**

Oleh:

Nindya Utami

Pembimbing: Yessi Mutia Basri dan Al Azhar L

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
e-mail : nindyau284@yahoo.co.id*

*Effect Of Internal Control Systems Of Government, The Performance Of Employees,
Attached Supervision And Functional Supervision Of The Effectiveness Of
Financial Management Area (SKPD District Study In Lima Puluh
Kota Payakumbuh West Sumatra)*

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of Government Internal Control System, Employee Performance, Monitoring Fitted and functional supervision on the Effectiveness of Financial Management (Studies in SKPD Lima Puluh Kota West Sumatra). This study used convenience sampling method. The sample in this study is the SKPD Lima Puluh Kota West Sumatra. Respondents were instrumental in this research is 75 respondents consisting of a chief financial officer, financial records staff / accounting and regional inspectorate. The statistical method used to test the hypothesis is multiple regression with the help of SPSS version 18.0. The results provide evidence that the Government Internal Control System, Employee Performance, Monitoring and Control Functional Fitted have significant effect on the Effectiveness of Financial Management through multiple correlation coefficient (R) of 0789 and the relationship is very strong

Keywords: Government Internal Control System, Employee Performance, Monitoring, Control Functional Fitted and Fiscal Management Effectiveness

PENDAHULUAN

Reformasi pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari tujuan diberlakukannya otonomi daerah itu sendiri, yaitu selain untuk peningkatan pelayanan publik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, juga dalam rangka pengalokasian

sumber daya yang efisien dan efektif, serta penciptaan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Sekalipun demikian, berbagai perubahan tersebut harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu akuntabilitas, kejujuran dalam mengelola keuangan

publik, transparan, dan pengendalian. Keuangan daerah dikelola dengan berdasarkan azas umum: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Seperti yang terjadi di SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh Sumatra Barat berdasarkan hasil laporan keuangan terlihat bahwa dalam mengelola dana publik belum efektif dan belum mematuhi terhadap semua aturan dalam mengelola dana serta tidak dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik. Hal ini mengakibatkan SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh Sumatra Barat memperoleh opini atas pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK yaitu opini WDP. Opini ini sama dengan opini yang diberikan BPK RI atas LKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh Sumatra Barat pada tahun-tahun sebelumnya.

Opini WDP yang didapat oleh SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh Sumatra Barat menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala yang ada yaitu: Tanggung jawab pegawai dalam mengelola keuangan belum maksimal, keuangan daerah belum ditata sedemikian rupa sehingga tidak mampu melunasi semua ikatan keuangan dan jangka pendek maupun jangka panjang, nilai persediaan yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2013 belum menggambarkan seluruh saldo persediaan, penatausahaan Aset Tetap seluruh SKPD tidak memadai,

sehingga Nilai Aset Tetap pada Neraca Per 31 Desember 2013 tidak dapat diyakini kewajarannya.

Fenomena tersebut di atas menunjukkan bahwa kemampuan manajemen dalam menjalankan fungsi-fungsinya sangat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan dan efektivitas pengendalian intern.

Pengendalian internal dalam pemerintahan memang dirasa sangat perlu untuk menghindari tindakan-tindakan kecurangan yang mungkin ataupun telah dilakukan oleh berbagai pihak yang berkecimpung di dunia pemerintahan. Dalam melaksanakan pengendalian internal ini, pihak-pihak yang berkaitan mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Namun, dalam kenyataannya pengendalian ini belum maksimal diterapkan dalam aktivitas pemerintahan.

Penelitian tentang sistem pengendalian internal pernah diteliti yaitu oleh Angga Suprayogi (2010) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.

Selain pengendalian internal, kinerja pegawai juga harus diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dikarenakan agar pengelolaan keuangan daerah mendapatkan hasil yang maksimal. Kinerja pegawai pada dasarnya terbentuk setelah pegawai merasa adanya kepuasan, karena kebutuhannya terpenuhi, dengan kata lain apabila kebutuhan pegawai belum terpenuhi sebagaimana mestinya maka kepuasan kerja tidak akan tercapai, dan pada hakikatnya

kinerja pegawai akan sulit terbentuk. Setiap orang yang bekerja digerakan oleh suatu motif. Motif pada dasarnya bersumber pertama-tama sebagai kebutuhan dasar individu atau dapat dikatakan bahwa kekuatan yang memotivasi seorang untuk bekerja giat dalam pekerjaannya tergantung dari hubungan timbal balik antar apa yang diinginkan atau dibutuhkan dan hasil pekerjaan tersebut dan seberapa besar keyakinan organisasi akan memberikan kepuasan bagi keinginannya sebagai imbalan atas usaha yang dilakukannya.

Perwakilan BPKP Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh Sumatra Barat menyusun Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Hal ini selaras dengan peraturan yang berlaku, yaitu setiap organisasi publik diwajibkan menyusun suatu rencana strategis (*strategic plan*), rencana kerja (*performance plan*) dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*).

Dalam upaya peningkatan kinerja Akuntan Pemerintah Perwakilan BPKP Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh Sumatra Barat, masih terdapat banyak persoalan yang dihadapi sehingga sulit untuk mencapai tujuan organisasi. Kondisi yang belum ideal masih terjadi pada Akuntan Pemerintah Perwakilan BPKP Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh Sumatra Barat, seperti adanya pegawai datang kerja terlambat, istirahat dari jam kerja lebih awal, motivasi yang rendah

dalam mengerjakan tugas, adanya tekanan baik dari internal maupun eksternal dan didukung dengan lingkungan kerja yang kurang nyaman.

Penelitian tentang kinerja pegawai pernah diteliti yaitu oleh Nurhanifah (2014) yang menyatakan bahwa kinerja pegawai berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah di SKPD Provinsi Riau. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dina Mardina (2011) yang menyatakan bahwa kinerja pegawai tidak berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Inspektorat Kota Bandung.

Tahap pengawasan, seharusnya merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan berjalan secara ekonomis, efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut belum sepenuhnya berfungsi sebagaimana mestinya. Fungsi pengawasan masih bersifat korektif dan belum preventif. Pengawasan yang *inefisiensi* dan temuan hasil pengawasan yang dipastikan masih sering dijumpai. Keadaan ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian yang merupakan salah satu fungsi akuntansi belum diimplementasikan secara maksimal. Hal tersebut menyebabkan peran aparat pengawasan intern pemerintah belum efektif dalam menciptakan *early warning sistem*.

Pengawasan melekat adalah pemantauan, pemeriksaan, evaluasi yang dilakukan serta berdaya guna berhasil guna oleh unit / organisasi kerja terhadap fungsi semua komponen untuk mewujudkan kerja

dilingkungan masing-masing, agar secara terus menerus berfungsi maksimal melaksanakan tugas pokok pada pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam pengamatan sehari-hari, pelaksanaan pengawasan melekat di lingkungan SKPD Kabupaten Payah Kumbuh dapat ditemui masih banyaknya uraian tugas untuk masing-masing personil yang belum tersosialisasikan atau terdistribusikan sampai tingkat staff sehingga dapat dikatakan tingkat pemahaman suatu kebijakan khususnya kebijakan pengawasan melekat begitu rendah, hal ini akan mempengaruhi suatu kedisiplinan, ketekunan, dedikasi, loyalitas, inisiatif dan kreatifitas.

Pengawasan melekat pernah diteliti oleh Nurhanifah (2014) yang menyatakan bahwa pengawasan melekat berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah di SKPD Provinsi Riau.

Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau aparat dan memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan, pengujian, penilaian, monitoring, dan evaluasi. Tujuan pengawasan fungsional adalah untuk menjamin terlaksananya tugas pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih dan beribawa.

Pengawasan fungsional yaitu pengawasan dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional. Pengawasan fungsional pada pemerintah daerah dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah yang melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah daerah,

khususnya mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah agar dapat memenuhi tujuan efektifitas pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Fungsional pernah diteliti yaitu oleh Nurhanifah (2014) yang menyatakan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah di SKPD Provinsi Riau.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu: (1) Nurhanifah (2014) mengenai Pengaruh kinerja pegawai, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional terhadap efektifitas keuangan daerah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti kinerja pegawai, pengawasan melekat, pengawasan fungsional. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti menambah satu variabel yaitu sistem pengendalian interen pemerintah. (2) Sinta Suhanda Wati (2012) tentang Analisa atas pengawasan fungsional terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah pada Inspektorat Kota Bandung. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama pengawasan fungsional. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah peneliti menambah 3 variabel yaitu kinerja, pengawasan melekat dan sistem pengendalian interen pemerintah. Teknik analisis data yang digunakan Sinta adalah regresi sederhana. Peneliti menggunakan regresi linear berganda. (3) Angga Suprayogi (2010) tentang Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektifitas keuangan daerah (Suatu studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung).

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti sistem pengendalian intern pemerintah. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah peneliti menambah 3 variabel yaitu pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan kinerja pegawai. Teknik analisis data yang digunakan Angga adalah regresi sederhana peneliti menggunakan regresi linear berganda.

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:(1)Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh Sumatra Barat)?, (2)Apakah Kinerja Pegawai berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh Sumatra Barat)? (3)Apakah Pengawasan Melekatberpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh Sumatra Barat)? (4)Apakah Pengawasan Fungsional berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh Sumatra Barat)?

Tujuan penelitian ini adalah (1)Untuk membuktikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota

Payakumbuh Sumatra Barat), (2)Untuk membuktikan Kinerja Pegawai berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh Sumatra Barat), (3)Untuk membuktikan Pengawasan Melekatberpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh Sumatra Barat), (4) Untuk membuktikan Pengawasan Fungsional berpengaruh terhadap Efektivitas Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh Sumatra Barat).

TINJAUAN PUSTAKA KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam PP No 60 tahun 2008, kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arah pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi serta sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi suatu instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian intern terdiri atas review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah perlu diciptakannya sistem pengendalian intern pemerintah agar instansi pemerintah dapat mengetahui dana publik yang digunakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Putri : 2013).

Efektivitas secara umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa: efektifitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efektifitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Dengan adanya pengendalian intern maka seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisiensi untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Soeseno, dalam Ramandei 2009). Oleh karena itu diharapkan dengan sistem pengendalian intern yang efektif akan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Angga Suprayogi (2010) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung).

H₁ :Sistem Pengendalian Interen Pemerintah berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengaruh Kinerja Pegawai terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil.

Mardiasmo (2009 :21) mengemukakan kinerja program berhubungan dengan akuntabilitas publik, karena pemerintah sebagai pengemban amanat masyarakat bertanggungjawab atas kinerja yang telah dilakukannya, hal tersebut karena pemerintah berkewajiban untuk mengelola program pembangunan dalam rangka menjalankan pemerintahannya.

Efektifitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efektifitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Dengan adanya kinerja pegawai yang maksimal (bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan dan membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi), maka akan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sependapat dengan penelitian Dody Hermana (2009) membuktikan dalam penelitiannya bahwa Kinerja Pegawai dapat mempengaruhi efektivitas keuangan daerah. Dikatakan bahwa Kinerja Pegawai sangat menunjang terhadap pencapaian efektivitas pengelolaan

keuangan daerah maupun dalam pelaksanaan kebijakan keuangan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan optimal. Hasil penelitian yang dilakukan Dina Mardiana (2011) juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja pegawai dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut:

H₂ :Sistem Pengawasan Melekat berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengaruh Pengawasan Melekat terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Situmorang dalam Rudi Harto (2012) mengatakan bahwa pengawasan melekat yaitu berupa tindakan atau kegiatan usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi. Suatu proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh pimpinan unit organisasi kerja terhadap fungsi semua komponen untuk mewujudkan kerja di lingkungan masing-masing agar secara terus menerus berfungsi secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokok yang terarah pada pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Mardiasmo (2009:134) menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi telah

mencapai tujuan tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Sebagaimana yang disimpulkan dalam penelitian Nur Hanifah (2014) menyatakan bahwa pengawasan melekat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut:

H₃ :Sistem Pengawasan Melekat berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengawasan fungsional pemerintah daerah menurut Hanif Nurcholis (2007:312) menyatakan bahwa Pengawasan fungsional pemerintah daerah adalah pengawasan terhadap pemerintahan daerah yang dilakukan secara fungsional baik dilakukan oleh departemen sektoral maupun departemen yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri).

Menurut Jhon dan Pendlebury yang dikutip oleh Wati (2012) mengatakan bahwa Efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuan.

Jika kegiatan audit dilandasi dengan kemampuan professional aparat yang melakukan audit yaitu (1) memiliki kemampuan /keahlian yang disyaratkan, (2) independen, (3) serta menggunakan kemahiran professional secara cermat dan seksama, maka hasil audit yang dilakukan akan lebih baik (Arens et al.2006, Wahyudi 2003, Ikatan Akuntan Indonesia 2008, Badan Pemeriksa Keuangan 2008). Dengan demikian secara konseptual

profesionalitas aparat pengawasan fungsional mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan audit pemerintahan. Dengan demikian, pengawasan fungsional berpengaruh terhadap adanya efektivitas pengelolaan keuangan daerah, dikarenakan bahwa pengawasan fungsional dapat meningkatkan adanya ke efektivitasan pengelolaan keuangan daerah, semakin sering melakukan pengawasan maka semakin bagus pula efektivitas pengelolaan keuangan daerahnya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Sinta Suhanda Wati (2012) menyatakan bahwa pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Inspektorat Kota Bandung. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut:

H₄: Sistem Pengawasan Fungsional berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian *korelasional*, yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan mengenai pengaruh antara variable independent dengan variable dependent. Penelitian ini dilaksanakan di SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh Sumatra Barat.

Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh Sumatra Barat yang berjumlah 42 SKPD. Pengambilan jumlah sampel dengan menggunakan teknik *Convenience Sampling*, jadi sampel dalam penelitian ini adalah 75 orang dengan criteria: Responden ditetapkan pada kepala bagian keuangan, staf pencatatan keuangan/akuntansi dan inspektorat daerah (berfungsi sebagai auditor internal yang bekerja dalam

pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah).

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah : data primer dengan menggunakan kuesioner yang disebar ke SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh Sumatra Barat). Responden dari penelitian ini adalah karyawan di SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh Sumatra Barat).

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei yaitu metode pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden dalam bentuk pernyataan tertulis. Setiap responden diminta untuk memilih salah satu jawaban dalam kuesioner yang sesuai dengan persepsinya di antara alternatif jawaban yang telah disediakan. Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner dibuat menggunakan skala 1 sampai dengan 5 untuk mendapatkan rentang jawaban sangat tidak setuju sampai dengan jawaban sangat setuju dengan memberi tanda cek (√) atau tanda silang (×) pada kolom yang dipilih.

Variabel dependen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independennya (Sugiyono, 2010:59). Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Variabel independennya antara lain : sistem pengendalian intern pemerintah, kinerja pegawai, pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Setiap pernyataan dari variabel yang diteliti menggunakan skala Likert (Sugiyono, 2010:86) dan masing-masing butir pernyataan diberi skor 1 sampai 5. Metode Analisis data dilakukan dengan

menggunakan bantuan program komputer yaitu SPSS (Statistical Package For Sosial Science). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda.

Analisis Deskriptif

Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai minimum 60 dengan nilai maksimum 95, memiliki nilai *mean* 78.47 dan nilai standar deviasi 7.448, Kinerja Pegawai memiliki nilai minimum 33 dengan nilai maksimum 55, memiliki nilai *mean* 45.01 dan nilai standar deviasi 4.878. Untuk variabel Pengawasan melekat nilai minimum 8 dengan nilai maksimum 20, memiliki nilai *mean* 14.96 dan nilai standar deviasi 3.411. Untuk variabel Pengawasan Fungsional nilai minimum 17 dengan nilai maksimum 33, memiliki nilai *mean* 25.13 dan nilai standar deviasi 4.081. Untuk variabel Efektivitas Pengelolaan keuangan nilai minimum 17 dengan nilai maksimum 28, memiliki nilai *mean* 24.09 dan nilai standar deviasi 2,521. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari data di atas nilai rata-rata tertinggi berada pada variable Sistem Pengendalian Internal yaitu responden lebih banyak merespon tentang pengelolaan keuangan yang baik dan benar.

Uji Validitas

uji validitas menunjukkan bahwa nilai r_{hitung} variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kinerja Pegawai, Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah lebih besar dibanding nilai r_{tabel} . Dengan demikian indikator atau kuesioner yang digunakan oleh variabel Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, Kinerja Pegawai, Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan valid untuk digunakan sebagai alat ukur variabel.

Uji Reliabilitas

reliabilitas menunjukkan nilai *cronbach alpha* semua variabel lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan dapat disimpulkan indikator atau kuesioner yang digunakan variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kinerja Pegawai, Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan dapat dipercaya sebagai alat ukur variable.

Uji Normalitas

Nilai Kolmogrov-Smirnov dari variabel *self* Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kinerja Pegawai, Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0.604, 0.839, 0.247, 0.343 dan 0.517 lebih besar dari 0.05, artinya bahwa residual terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Nilai *variance inflation factor* (VIF) < 10 dan *tolerance* > 0,10. Maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

Uji Heterokedastisitas

Data tersebar diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y namun membentuk suatu pola tertentu. Dengan demikian tidak dapat disimpulkan apakah dalam model

regresi terjadi gejala heterokedastisitas. Metode yang lebih handal adalah dengan menggunakan uji korelasi antara variabel bebas dengan *Unstandardized*. Apabila nilai *Probability* antara variabel bebas dengan *Unstandardized* > 0,05 berarti tidak terdapat heterokedastisitas dalam model regresi.

Hasil Regresi Berganda

$$Y = 4.073 + 0.138 X_1 + 0.068X_2 + 0.182X_3 + 0.136X_4 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a. Nilai Konstanta sebesar (a) 4.073 artinya adalah apabila Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X1), Kinerja Pegawai (X2) Pengawasan Melekat (X3) dan Pengawasan fungsional (X4) nilainya diasumsikan nol (0), maka Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 4.073.
- b. Nilai Koefisien regresi variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X1) sebesar 0,138 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda positif) 1 point Sistem Pengendalian Intern Pemerintah akan meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0,138 dengan anggapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X1) tetap. Peningkatan ini bernilai positif, yang bermakna semakin tinggi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah maka semakin tinggi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Koefisien regresi Kinerja Pegawai (X2) sebesar 0.068

menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda positif) 1 point Kinerja Pegawai akan meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0.068 dengan anggapan Kinerja Pegawai (X2) tetap. Peningkatan ini bernilai positif, yang bermakna semakin tinggi Kinerja Pegawai maka semakin tinggi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

- d. Koefisien regresi Pengawasan Melekat (X3) sebesar 0.182 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda positif) 1 point Pengawasan Melekat akan meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0.182 dengan anggapan Pengawasan Melekat (X3) tetap. Peningkatan ini bernilai positif, yang bermakna semakin tinggi Pengawasan Melekat maka semakin tinggi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e. Koefisien regresi Pengawasan Fungsional (X3) sebesar 0.136 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda positif) 1 point Pengawasan Fungsional akan meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0.136 dengan anggapan Pengawasan Fungsional (X3) tetap. Peningkatan ini bernilai positif, yang bermakna semakin tinggi Pengawasan Fungsional maka semakin tinggi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X1). Diketahui

$t_{hitung} (4.188) > t_{tabel}(1,980)$ dan sif. $0.000 < 0.05$, artinya variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh Sumatra Barat).

2. Kinerja Pegawai (X2). Diketahui $t_{hitung} (3.513) > t_{tabel} (1,980)$ dan sif. $0.005 < 0.05$, artinya variabel Kinerja Pegawai berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh Sumatra Barat).
3. Pengawasan Melekat(X3). Diketahui $t_{hitung} (2.851) > t_{tabel}(1,980)$ dan sif. $0.006 < 0.05$, artinya variabel Pengawasan Melekat berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh Sumatra Barat).
4. Pengawasan Fungsional (X3). Diketahui $t_{hitung} (2.357) > t_{tabel}(1,980)$ dan sif. $0.021 < 0.05$, artinya variabel Pengawasan Fungsional berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh Sumatra Barat).

Koefisien Determinasi

Hasil koefisien determinasi nilai R^2 merupakan nilai R Squared dalam tabel di atas sebesar 0.623 artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel

independen (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kinerja Pegawai, Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional)) terhadap variabel dependen (Pengelolaan Keuangan Daerah) adalah sebesar 62.3%, sedangkan sisanya 17.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini..

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kinerja Pegawai, Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh Sumatra Barat). Responden penelitian ini berjumlah 75 aparat pemda yang bekerja di dinas-dinas Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh Sumatra Barat yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh Sumatra Barat). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dimiliki aparat pemda dalam menjalankan penugasan profesionalnya maka akan semakin tinggi pula Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang dihasilkan.

2. Kinerja Pegawai berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh Sumatra Barat). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Kinerja Pegawai yang dimiliki aparat pemda dalam menjalankan penugasan profesionalnya maka akan semakin tinggi pula Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang dihasilkan.
 3. Pengawasan Melekat berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh Sumatra Barat). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pengawasan Melekat yang dimiliki aparat pemda dalam menjalankan penugasan profesionalnya maka akan semakin tinggi pula Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang dihasilkan.
 4. Pengawasan Fungsional berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Payakumbuh Sumatra Barat). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Pengawasan Fungsional yang dimiliki aparat pemda dalam menjalankan penugasan profesionalnya maka akan semakin tinggi pula Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang dihasilkan.
- lakukan pada aparat pemda di seluruh SKPD kota atau Provinsi.
2. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan metode wawancara langsung pada masing-masing responden dalam upaya mengumpulkan data, sehingga dapat menghindari kemungkinan responden tidak objektif dalam mengisi kuesioner.
 3. Untuk penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan adanya variabel independen dan variabel moderasi lain sebagai faktor-faktor yang juga dapat mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah, baik berasal dari faktor internal maupun eksternal aparat sehingga hasil dari penelitian akan lebih meluas dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens. A, et.all, 2006, *Auditing dan Jasa, Assurance: Pendekatan Integrasi (Alih Bahasa: Herman Wibowo)*, Jakarta: Salemba Empat
- Dody Hermana, 2009, *Media Pembelajaran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hanif Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2008, *Standar Profesional Akuntan Publik*, Jakarta: Salemba Empat
- Mardiana Dina, 2011, *Pengaruh Kinerja Pegawai dan Pengawasan Fungsional*

Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas objek penelitian dan tidak hanya pada aparat pemda di dinas-dinas saja, tetapi dapat di

- terhadap efektivitas
pengelolaan keuangan
daerah pada Inspektorat
Kota Bandung, Jurnal
Universitas Komputer
Indonesia, Bandung
- Mardiasmo, (2009). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.
- Nurhanifah, 2014. *Pengaruh Kinerja Pegawai, Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Provinsi Riau)*, Jurnal Vol 1 No. 2
- Putri Natalia Dewinda, 2013, *Pengaruh Komitmen Organisasional dan Peran Manajer Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Studi di Kabupaten Tegal*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Ramandei, 2009, Philipus., *Karakteristik Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal dan Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah*, Jurnal Maksi, Vol. 10. January, Universitas Diponegoro, Semarang
- Rudi Harto, 2012, *Pengaruh Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional terhadap Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya)*. Skripsi
- Sugiyono 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suprayogi, Angga. 2010. *Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Suatu studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung)*, Jurnal, Universitas Pasundan
- Wahyudi, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Sulita
- Wati, Sinta Suhanda. 2012. *Analisis Atas Pengawasan Fungsional Pengaruhnya Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat Kota Bandung*, Jurnal, Universitas Komputer Indonesia
- Undang-Undang Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Undang-Undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.